

Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia

Zamahsari Abdul Azis¹

¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
zamahsariaa1984@gmail.com¹

Abstract:

The educational path is a vehicle through which students develop their potential in an educational process by the objectives of education. In reality, there are still many problems in implementing the education system, especially Islamic education in Indonesia. The transformation of Islamic education, which refers to the direction of the Ministry of Religion's policy in the field of education, needs to be carried out by further developing a broader concept of education by the dynamics and developments of society. The method used in this study is library research. The results of this study indicate that: 1) Islamic education must be directed to (i) creating Islamic morals, faithful, and pious humans, (ii) believing it as a truth, and (iii) proving it in action. 2) The direction of Islamic education policy in the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia includes: a) Strengthening the education system with a moderate perspective, b) Increasing the quality of educators in educational units, c) Increasing student participation in educational units, d) Increasing the number of teachers who meet the SNP, e) Increasing the standard of education quality, f) Strengthening student character education, g) Increasing the quality of vocational education based on cooperation with the world of work/industry, h) Increasing the quality of PTKI with an international reputation, i) Increasing the quality of PTK graduates accepted in the world of work, j) Increasing the quality of research utilization, k) Increasing the effective and accountable organizational governance of the Directorate General of Islamic Education.

Keywords: Policy, Strategy, Islamic Education, Ministry of Religious Affairs of Indonesia

Abstrak:

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan. Pada kenyataannya, masih banyak problem terjadi dalam pelaksanaan sistem pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Transformasi pendidikan Islam yang mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan perlu dilakukan dengan lebih mengembangkan konsep pendidikan yang lebih luas dan komprehensif sesuai dengan dinamika dan perkembangan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan Islam haruslah diarahkan untuk (i) menciptakan manusia berakhlak Islam, beriman, dan bertakwa, (ii) meyakinkannya sebagai suatu kebenaran, (iii) membuktikan dalam perbuatan. 2) Arah kebijakan pendidikan Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia meliputi: a) Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat, b) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, c) Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan, d) Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP, e) Meningkatnya standar mutu pendidikan, f) Menguatnya pendidikan karakter siswa, g) Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industry, h) Meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional, i) Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja, j) Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian, k) Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Kebijakan, Strategi, Pendidikan Islam, Kementerian Agama Indonesia

PENDAHULUAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama pada tahun 2020-2024 mencakup sejumlah bidang penting yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan kehidupan beragama di Indonesia. Di antara kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, moderasi beragama, serta kerukunan umat beragama. Selain itu, ada fokus pada peningkatan keselarasan relasi antara agama dan budaya, kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat. Peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi salah satu prioritas dengan peningkatan pembelajaran dan pengajaran, pemerataan akses pendidikan berkualitas, penempatan pendidik yang berkualitas, dan penjaminan mutu pendidik. Selain itu, di antara strategi yang dikembangkan mencakup peningkatan karakter siswa dan peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Pada dasarnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam konteks pendidikan agama, pemerintah secara spesifik telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/perkuliahan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling

melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pada kenyataan masih banyak problem terjadi dalam pelaksanaan sistem pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Tantangan pendidikan saat ini semakin besar, apalagi dengan munculnya berbagai macam problematika sosial kemasyarakatan yang merasuk pada berbagai sendi kehidupan. Abuddin Nata mengidentifikasi delapan penyakit yang menimpa masyarakat moderen antara lain adalah disintegrasi antar ilmu pengetahuan (spesialisasi yang terlampau kaku) yang berkiblat pada terjadinya pengkotakan akal pikiran manusia dan cenderung membingungkan masyarakat. Kemudian kepribadian yang terpecah (split personality) sebagai akibat dari kehidupan yang dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang terlampau terspesialisasi dan tidak berwatak nilai ketuhanan, dangkalnya rasa keimanan, ketakwaan, serta kemanusiaan sebagai akibat dari kehidupan yang terlampau rasionalistik dan individualistik, timbulnya pola hubungan yang materialistik sebagai akibat dari kehidupan yang mengejar duniawi yang berlebihan.

Mereka juga cenderung menghalalkan segala cara, sebagai akibat dari paham hedonisme yang melanda kehidupan. Selain itu penyakit mudah stres dan frustrasi, sebagai akibat dari terlampau percaya dan bangga terhadap kemampuan dirinya, tanpa dibarengi sikap tawakkal dan percaya pada ketentuan Tuhan. Perasaan terasing juga menyelimuti di tengah keramaian (lonely) sebagai akibat dari dominannya sifat individualistik. Kehilangan harga diri dan masa depannya, sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang. Kondisi di atas menjadikan berbagai macam problematika pelaksanaan pendidikan Islam. Karena itulah senantiasa terbuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan dukungan segenap komponen dalam sistem pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Penulis mengumpulkan sejumlah referensi tentang arah kebijakan strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia baik itu buku, jurnal, maupun dokumen peraturan pemerintah yang terkait referensi tersebut yang dikaji secara seksama untuk memperoleh penjelasan yang rinci. Mengacu pada kajian tersebut, peneliti kemudian merumuskan pandangannya mengenai arah kebijakan strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Konsep Kebijakan dan Strategi dalam Sistem Pendidikan Islam

Secara umum kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, atau institusi tertentu di suatu tempat untuk menyelesaikan hambatan serta alternatif pelaksanaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang sekedar diusulkan dalam beberapa kegiatan untuk menyelesaikan masalah.

Pada awalnya istilah strategi berasal terminologi militer, bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga bisa didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para manajer memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Di sisi lain strategi juga bisa didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.¹

Masyarakat pembelajaran di Indonesia saat ini berkembang begitu dinamis, beberapa karakter masyarakat tersebut diantaranya : (i) memiliki berbagai latar belakang pembelajaran yang terpadu dalam suatu jaringan, (ii) menipisnya batas-batas berbagai latar belakang pendidikan, (iii) menimbulkan suatu identitas diri dan tempat, (iv) mendorong interaksi dan komunikasi antara peserta pembelajaran, (v) mengadopsi dan mengadaptasi secara cepat berbagai kebutuhan belajar, (vi) menampung berbagai perbedaan dari peserta pembelajaran, (vii) menyediakan kebutuhan belajar, baik umum maupun khusus. ²

¹ Eko Yulianto, Suharto, and M. Ihsan Dacholfany, "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Manajeme* 2, no. 2 (2021).

² Nurotun Mumtahanah, Elok Nuriyyah Pratama, and Ahmad Suyuthi, "Artikulasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Kitab Ta'lim Al-Muta'allim Di SMP Plus Ar Rahmat Bojonegoro," *Akademika* 14, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.30736/adk.v14i02.442>.

Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan di Indonesia sudah mengalami berbagai macam pasang surut dalam rentang waktu yang cukup panjang, Diawali dari era sebelum penjajahan, era kolonialisme, era kemerdekaan baik pada era orde baru, reformasi, maupun sesudahnya. Perkembangan tersebut jelas menunjukkan adanya berbagai macam perubahan yang mengarah pada konsep transformasi pendidikan baik yang mengarah pada kurikulum, sampai pada aspek politik pendidikannya. Transformasi arah kebijakan pendidikan yang dimaknai sebagai proses perubahan yang lebih baik mutlak dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan Gorton bahwa Pengelola perlu menyadari bahwa siswa yang kini bersekolah kemungkinan besar akan dihadapkan pada keadaan dan permasalahan ketika sudah dewasa yang akan sangat berbeda dengan apa yang dihadapi oleh orang dewasa saat ini.³

Transformasi pendidikan bisa dilakukan dengan lebih mengembangkan konsep pendidikan yang lebih luas dan komprehensif sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Konsep komprehensif pendidikan yang mensinergikan antara *transfer of learning* dan *transfer of value* patut dikembangkan dalam sistem pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama. Gorton dalam hal ini menegaskan bahwa Salah satu permasalahan yang akan dihadapi oleh administrator adalah apakah tujuan sekolah harus dibatasi pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa, atau apakah sekolah harus mencoba memperluas misinya dengan memasukkan pengajaran sikap dan nilai.⁴

Sejalan dengan sistem pendidikan yang bergerak dinamis, harus tetap ada beberapa nilai yang bersifat transenden yang harus senantiasa dipertahankan karena akan menjiwai munculnya perilaku faktual dalam kemasyarakatan. Berbagai macam komponen dalam sistem pendidikan harus bisa bergerak dinamis untuk mengimbangi dinamika sistem pendidikan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah bagian dari masyarakat, karena itu harus siap melakukan perubahan.⁵

Program pendidikan Islam berkembang terus sebagaimana dilambangkan melalui perkembangan lembaganya, yaitu dari lembaga pesantren muncul madrasah kemudian muncul sekolah Islam dan bahkan Perguruan Tinggi Islam. Usaha pendidikan yang sudah berjalan sekian lama pasti memerlukan penyesuaian kepada tuntutan baru sejalan dengan

³ Richard A. Gorton, *School Administration*. (Iowa : Wm.C. Brown, 1977). 16.

⁴ *Ibid.* 343

⁵ *Ibid.*

perkembangan budaya bangsa. Dalam hal inilah konsep transformasi pendidikan Islam menemukan peran sentralnya.

Sejalan dengan hal di atas maka tujuan pendidikan Islam haruslah diarahkan untuk (i) menciptakan manusai berakhlak Islam, beriman, dan bertakwa, (ii) meyakinkannya sebagai suatu kebenaran, (iii) membuktikan dalam perbuatan. Pendidikan tidak hanya mentransformasikan ilmu, keterampilan, serta kepekaan, namun mampu membekali anak untuk memecahkan permasalahan untuk saat ini maupun yang akan datang. Pendidikan harus berorientasi ke masa yang akan datang, karena sesungguhnya anak didik masa kini adalah bangsa yang akan datang.⁶

Arah Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama di Indonesia

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan yang tertuang dalam rencana strategik kementerian agama tahun 2020-2024 adalah:⁷

1. Program Pendidikan Islam

a. Sasaran Program (*Outcome*)

- 1) menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
 - a) rerata nilai UASBN/UMBN /Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama;
 - b) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKI/PTU yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - c) persentase pemahaman moderasi beragama agama pada mahasiswa PTKI.
- 2) meningkatnya kualitas kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - a) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - b) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- 3) meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:

⁶ Muh Habibulloh Habib, Imam Fuadi, and Prim Masrokan Mutohar, "Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah," *EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33367/jiee.v5i1.3284>.

⁷ Nurul Hidayat, Imam Fuadi, and Abad Badruzaman, "Transcendental Transformative of Islamic Pedagogy (The Implications of the Prophet Ibrahim a . s . Story in a Transformative Pedagogy Perspective)," *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 01, no. 02 (2021).

- a) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik;
 - b) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - c) persentase dosen berkualifikasi S3.
- 4) meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
- a) persentase peningkatan siswa pada RA;
 - b) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula;
 - c) persentase peningkatan siswa pada MTs/ Wustha;
 - d) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya;
 - e) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK); dan persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly.⁸
- 5) meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
- a) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- 6) meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
- a) persentase Madrasah/PDF yang memenuhi 8 SNP
 - b) persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - c) persentase Madrasah/pendidikan keagamaan yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - d) persentase PTKI/Ma'had Aly yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan.
- 7) menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
- a) persentase siswa Madrasah/PDF yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- 8) meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:
- a) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
 - b) persentase program ekonomi kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri.
- 9) meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
Edu Journal Innovation in learning and education
Vol. 02 No. 02 Desember 2024

- a) persentase PTKI yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - b) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI.
- 10) meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
- a) persentase PTKI yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - b) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- 11) meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
- a) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- 12) meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- a) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - b) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - c) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - d) nilai Maturitas SPIP; dan Indeks Profesionalitas ASN.

No.	Jenis	Unit Eselon I	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan umum berciri khas agama	Ditjen Pendidikan Islam	1. RA	29.792	1.313.022
			2. MI	25.556	3.793.550
			3. MTs	18.137	3.184.790
			4. MA	8.790	1.387.211
2	Pendidikan keagamaan	Ditjen Pendidikan Islam	1. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Ula	718	32.986
			2. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Wustha	1.214	106.468
			3. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Salafiyah Ulya	866	60.948
			4. PTK Islam (PTKIN dan PTKIS)	793	987.553
		Ditjen Bimas Kristen	5. Ma'had Aly	46	1.572
			1. SDTK	59	609
			2. SMPTK	83	2.665
			3. SMTK/SMAK	184	8.095
		Ditjen Bimas Katolik	4. PTK Kristen (STAKN, IAKN)	7	13.627
			1. Taman Seminari	50	1.274
			2. SMAK	33	3.547
		Ditjen Bimas Hindu	3. PTK Katolik (STAKatN)	1	553
			1. Pratama Widya Pasraman	33	958
			2. Adhi Widya Pasraman	241	385.289
			3. Madyama Widya Pasraman	361	577.928
		Ditjen Bimas Buddha	4. Utama Widya Pasraman	612	195.662
5. PTK Hindu	4		6.804		
1. Nava Dhammasekha	20		660		
2. PTK Buddha	2		216		
Total				87.569	12.065.029

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 2.1

Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga, dan Jumlah Peserta Didik



Gambar 2.2

Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 2.3

Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 2.4

Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 2.5

Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 2.6

Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 2.7

Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019



Gambar 2.8

Gambar 2.9

Grafik APM MA/Uiya/Utama Widya Grafik APK PTK/Ma'had Aly Tahun 2015-
Pasraman Tahun 2015-2019 2019⁹

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, bahkan melebihi target Renstra sebelumnya. Peningkatan akses ini memberikan kontribusi dalam menyukseskan program Wajib Dikdas 12 Tahun yang berkualitas baik melalui madrasah maupun satuan pendidikan keagamaan. Kenaikan APK yang melebihi target berkaitan dengan kemampuan Pendidikan Islam menjangkau dan memberikan santunan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kemudian menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu sebesar 64,49 persen - 73,63 persen¹⁰. Apabila dibandingkan kelompok yang sama di sekolah umum yang memperoleh KIP/PIP yang hanya 46,45 persen¹¹ ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam merupakan instrumen nasional untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh pendidikan umum, termasuk daerah 3T.

Apabila dikaitkan dengan capaian APK nasional, peningkatan akses di tingkat menengah belum berhasil berkontribusi dalam menuntaskan program Wajib Belajar 12 Tahun (APK nasional di tingkat sekolah menengah atas baru mencapai 88,55% (Sumber: Dapodik, Kemendikbud, 2019). Peningkatan akses di perguruan tinggi keagamaan cukup signifikan, tetapi jumlah absolut mahasiswa yang ditampung baru satu juta orang lebih sedikit.

Pemberian beasiswa BIDIKMISI kepada mahasiswa kurang mampu sebanyak 235.348 orang selama 2015-2019 atau sebesar 5,82% dari total mahasiswa belum bisa menaikkan akses PTK secara signifikan. Semetara itu, masih rendahnya APK perguruan tinggi secara keseluruhan sangat memengaruhi capaian IPM Nasional, yang pada tahun 2018, baru mencapai 71,39%.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam haruslah diarahkan untuk (i) menciptakan manusai berakhlak Islam, beriman, dan bertakwa, (ii) meyakinkannya sebagai suatu kebenaran, (iii) membuktikan dalam perbuatan. Arah kebijakan pendidikan Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia

⁹ Keterangan Gambar Satuan APK dan APM = Persentase Sumber: Kemendikbud 2019

¹⁰ Sumber: Ditjen. Pendidikan Islam, 2019

¹¹ Dihitung dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di <https://www.Kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/penyaluran-kartu-indonesiapintar-melebihi-target>.

meliputi menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat, meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan, meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP, meningkatnya standar mutu pendidikan, menguatnya pendidikan karakter siswa, meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri, meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional, meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja, meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian, serta meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Attas, Syed Muhammad Al Naquib. 1996. *The Concept of Education in Islam : A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Terjemah Haidar oleh Bagir. Bandung : Mizan.
- Daradjat, Zakiah Prof. Dr. 1996. *Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Departemen Agama. 2007. *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Oendidikan Keagamaan*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Gorton, Richard A. 1976. *School Administration : Challenge and Opportunity for Leadership*. Iowa : Wm. C. Brown Co.
- Habib, Muh Habibulloh, Imam Fuadi, and Prim Masrokan Mutohar. 2023. "Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah," *EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education* 5, no. 1, <https://doi.org/10.33367/jiee.v5i1.3284>.
- Hidayat, Nurul, Imam Fuadi, and Abad Badruzaman. 2021. "Transcendental Transformative of Islamic Pedagogy (The Implications of the Prophet Ibrahim a . s . Story in a Transformative Pedagogy Perspective)," *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 01, no. 02.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
- Mumtahanah, Nurotun, Elok Nuriyyah Pratama, and Ahmad Suyuthi. 2020. "Artikulasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Kitab Ta'lim Al-Muta'allim Di SMP Plus Ar Rahmat Bojonegoro," *Akademika* 14, no. 02, <https://doi.org/10.30736/adk.v14i02.442>.
- Yaqin, Ainul. 2015. *Menolak Liberalisme Islam*. Jawa Timur : MUI.

Yulianto, Eko, Suharto, and M. Ihsan Dacholfany. 2021. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Manajeme* 2, no. 2.